



TOWER BALAIKOTA SUDAH TERENCANA

Diwarnai Interupsi, Kesepakatan Ditunda

YOGYA (KR) - Penandatanganan kesepakatan antara DPRD Kota Yogya dengan Pemkot Yogya terkait pembangunan menara atau tower balaikota yang diagendakan Selasa (22/10), akhirnya ditunda. Dalam sidang paripurna sejumlah anggota dewan mengajukan interupsi agar proses penganggaran dengan sistem tahun jamak atau multi years dikaji ulang.

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiymoko selaku pemimpin sidang juga sempat menskorsing sidang guna meminta masukan dan pertimbangan dari pimpinan fraksi.

"Kami menyepakati untuk menunda penandatanganan kesepakatan bersama terkait pembangunan tower balaikota. Dengan begitu, kami juga akan melakukan review bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," jelasnya usai sidang.

Sesuai rencana, pembangunan tower balaikota akan dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 112,1 miliar. Teknis penganggaran melalui tahun jamak, yakni pada tahun 2020 sebesar Rp 32,1 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp 79,9 miliar.

Danang menambahkan, review ulang

tersebut agar agenda pembangunan lima tahunan tidak tersendat. Sehingga baik pembangunan fisik maupun nonfisik yang meliputi pemberdayaan dapat berjalan beriringan.

"Jangan sampai nanti ada yang terbebani. Kami melihat, perencanaan tower balaikota yang merupakan gedung unit XI sudah dilakukan sejak lama. Bahkan sejak walikota sebelumnya. Mudah-mudahan besok pagi (hari ini) sudah ada keputusan dan kita masukkan dalam kebijakan umum anggaran," urainya.

Sementara Walikota Yogya Haryadi Suyuti, menyerahkan sepenuhnya dinamika tersebut untuk dibicarakan pada level eksekutif dan legislatif. Menurutnya, tower balaikota sudah terencana baik dari sisi teknis pembangunan hing-

ga pemanfaatan. "Sebenarnya ini pada skala prioritas. Kami melihat pada pemanfaatannya untuk menyatukan pelayanan di balaikota. Mudah-mudahan hasil review itu sesuai dengan harapan kita semua," katanya.

Senada diungkapkan Sekda Kota Yogya Aman Yuriadijaya. Aspek perencanaan sudah dilakukan sejak lama serta Detail Engineering Design (DED) mulai dikerjakan tahun ini. Menurutnya, pihak legislatif dan eksekutif sebenarnya memiliki pemahaman yang sama menyangkut pemanfaatan dan kepentingan tower balaikota. Akan tetapi saat ini perlu penyesuaian dalam proses perencanaan anggaran atau strategi penyusunan fiskal.

"Kami akan menunggu keputusan politik, tapi konteksnya bukan menolak atau tidak menolak melainkan bagaimana skema anggaran. Apakah kita cukup mampu mulai menganggarkan di tahun 2020 atau setelahnya. Dimungkinkan juga ada penganggaran dalam alternatif lain," jelas Aman. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005